



SERAHKAN PENGHARGAAN - Ketua BPK RI Perwakilan Kalbar, Dra Ida Sundari MM menyerahkan penghargaan opini WTP Tahun Anggaran 206 kepada Bupati Ketapang Martin Rantan di Pontianak, Selasa (6/6).

Pemkab Ketapang Raih WTP dari BPK Kalbar

KETAPANG, TRIBUN - Pemkab Ketapang mendapatkan penghargaan Tanpa Tanpa Pengecualian (WTP) anggaran 2016. Penghargaan itu diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar) di Pontianak, Selasa (6/6).

Selain itu Pemkab Kubu Raya, Sanggau, Sekadau, Sintang, Mempawah, dan Pemerintah Kota Pontianak juga mendapatkan penghargaan itu. Bupati Ketapang, Martin Rantan dipercaya mewakili kabupaten dan kota itu untuk menyampaikan kata sambutan. "Meski mendapatkan penghargaan ini. Tapi saya menyampaikan permohonan maaf, apabila selama pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemkab Ketapang, ada hal kurang berkenan di hati para

auditor," kata Bupati dalam kata sambutannya.

Dia menegaskan terhadap laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan secara resmi. Merupakan bentuk petunjuk bagi kabupaten dan kota untuk melakukan perbaikan. Serta penyempurnaan terhadap pengelolaan keuangan pada masa mendatang.

Diharapkannya semakin baiknya pengelolaan keuangan, juga berpengaruh pada peningkatan kinerja penyelenggara pemerintah daerah se-Kalbar khususnya Ketapang. Pemkab Ketapang akan terus berupaya memperbaiki kekurangan dan sebagainya. "Jadi kita akan berupaya maksimal mendaklari rekomendasi, laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku,"

Bupati mengungkapkan, hingga saat ini Opini WTP sudah tiga kali diperoleh Pemkab Ketapang secara berturut-turut. Hal ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Ketapang untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

Serta sebagai implementasi visi misi pertama Bupati dan Wakil Bupati Ketapang masa jabatan 2016-2021. Namun dia menyadari tentu tetap terdapat kekurangan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya di Pemkab Ketapang.

Sebab itu di berbagai kesempatan, dia terus menyuarakan agar seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Ketapang untuk senantiasa bekerja keras. Serta memperbaiki dan menata pengelolaan ke-

uangan pada tiap satuan kerjanya. "Selain itu penerapan reward and punishment kepada SKPD akan dipikirkan, untuk mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah agar semakin baik," jelas Martin.

Dia menambahkan, pemerintah daerah telah berupaya maksimal memberikan informasi yang wajar. Serta disajikan dalam laporan keuangan daerah yang telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintah dan lain sebagainya.

Sebab itu diharapkannya pihak BPK RI Perwakilan Kalbar untuk tidak bosan-bosannya membina Pemerintah Daerah. "Misalnya saat kita melakukan konsultasi maupun melalui saran, rekomendasi tertulis atau cara lainnya," tuturnya. **(bnd)**